



ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Firdaus*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

*rinaastuti23072018@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the financial performance of the district Bengkalis by the area financial independence ratio in the 2014-2018 budget period and the area financial effectiveness ratio in the 2014-2018 budget period. This research is a descriptive study and the data is secondary data obtained from Bengkalis. The data analysis technique used is the ratio analysis technique to measure the financial performance of government. The study show that 1) The area financial independency ratio on average at 6.36%-9.64% with a very low category 2). The effectiveness ratio on average at 59.31%-90.02%, overall with a tendency not effective. Implications for institution life are policy makers need to continue and increase the Locally Generated Revenue with maximizing the potential of the area.

Keywords: *Financial Performance, Independence Tatio, The Ratio of Effectiveness*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan rasio kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui data sekunder. Data dianalisis dengan menghitung rasio kemandirian dan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Bengkalis berkisar 6.36%-9,64% termasuk kategori sangat rendah. 2). Rasio efektivitas berkisar antara 59.31%-90.02%, secara umum tergolong tidak efektif. Implikasi penelitian ini terhadap institusi (Pemerintah Kabupaten Bengkalis) sebagai pembuat kebijakan diharapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimal potensi yang ada di daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah agar kelak mampu mengembangkan potensi lokal secara maksimal. Karena daerahlah yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah itu sendiri.

Daerah dituntut agar mampu mandiri dalam merancang program-program pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional yang mengedepankan potensi dan kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Daerah otonom memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat secara transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan dimata publik.

Pemerintah Daerah diharapkan untuk senantiasa menggali potensi daerah sebagai yang dapat dijadikan sebagai pemasukan atau sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pengeluaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu diharapkan adanya kontribusi PAD yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung dari dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Halim mengatakan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, sebagai berikut (1) kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali potensi PAD, serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai dan menyelenggarakan pemerintahannya dan (2) ketergantungan yang tinggi atas bantuan pusat ditandai dengan PAD yang masih rendah .

Mudrajad menjelaskan ada beberapa faktor penghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi diantaranya (1) dominannya transfer dari pusat, kurang memaksimalkan perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), tingginya derajat sentralisasi dibidang perpajakan, rendahnya penerimaan pajak dan lemahnya dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah .

Kabupaten Bengkalis dengan APBD yang besar, bahkan termasuk salah satu kabupaten dengan APBD terbesar yang ada di Indonesia. Dana yang besar ini akan lebih mudah bagi Bengkalis untuk merancang program-program pembangunan untuk

memakmurkan masyarakat Bengkulu itu sendiri. Namun sebagian besar dana APBD tersebut bersumber dari DBH migas dan sangat kecil sekali porsi PADnya. Berikut adalah perbandingan jumlah APBD, DBH Migas dan PAD Kabupaten Bengkulu:

Tabel 1. APBD Kabupaten Bengkulu 2014-2018

Tahun	APBD	DBH Migas	PAD
2014	4,68 T	2,64 T	253,35 M
2015	5,34 T	1,05 T	258,89 M
2016	4,06 T	1,09 T	199,03 M
2017	3,97 T	816,18 M	271,87 M
2018	3,51 T	818,10 M	319,28 M

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat APBD Kabupaten Bengkulu masih sangat tergantung sekali dengan DBH Migas. Sumber daya alam yang tak terbarukan tersebut menjadi penopang utama APBD Bengkulu. Ketergantungan akan migas ini tidak bisa terus berlangsung, dimana Bengkulu tidak bisa hanya terus bergantung pada bagi hasil dari Migas yang terbatas keberadaannya. Dan porsi PAD yang tidak lebih dari 10% masih belum memadai untuk mendukung APBD.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan telah digunakan secara luas pada perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan penerapannya pada instansi publik khususnya pemerintah daerah masih sangat minim sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien serta akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta) .

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) dan rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran/kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan

daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman dari pihak ketiga.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besar / kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan/ yang telah ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif pada Kabupaten Bengkalis berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis periode anggaran 2014-2018 dan bagaimana Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis periode anggaran 2014-2018

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis periode anggaran 2014-2018 dan

Untuk mengetahui Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis periode 2014-2018.

METODE

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Objek penelitian ini adalah efektivitas keuangan daerah Kabupaten Bengkalis periode 2014-2018.

Jenis dan Sumber Data

Yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang RAPBD dan realisasi APBD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2018.

Data sekunder merupakan pengambilan data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini sifatnya hanya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur serta bacaan lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kelompok atau kumpulan individu-individu/objek penelitian yang memiliki standar-standar dan ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan yang mempunyai setidaknya satu persamaan karakteristik.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel diambil dari populasi yang harus mampu merepresentatif populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis Periode 2014-2018

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berupa penganalisaan laporan RAPBD dan realisasi RAPB Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dan intepretasi data bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkapkan fenomena sosial/gejala tertentu. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca/dipahami dan diimplementasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data, harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. Secara garis besarnya metode analisis yang digunakan dalam kajian studi ini terbagi atas dua bagian yakni analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, modus, median, mean, perhitungan rata-rata, standar deviasi serta perhitungan persentase.

Beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara lain rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai (Laporan Realisasi Anggaran) dengan besaran APBD yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini adalah pendekatan induksi dan deduksi. Pendekatan Induksi dengan melihat fakta yang ada kemudian melakukan analisis dengan dukungan teori yang ada untuk menguraikan dan mengambil kesimpulan dari argumentasi yang diberikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018

Kemandirian keuangan daerah merupakan suatu ukuran sejauh mana suatu daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan membiayai pengeluaran daerahnya secara mandiri. Dalam hal ini yang menjadi patokannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mandiri akan ditunjukkan dengan tingkat PAD yang tinggi pula, hal ini menunjukkan bahwa daerah telah mampu mengoptimalkan potensi yang ada di daerah menjadi sebagai sumber pendapatan daerah itu sendiri.

Bengkalis sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan peningkatan kemandirian agar tidak terlalu bergantung kepada sektor migas yang terbatas jumlahnya. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan mengefektifkan PAD dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada di daerah, agar mampu bersaing dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia baik itu dari segi pendidikan, kemandirian ekonomi, fasilitas kesehatan yang memadai serta tingkat kemiskinan yang rendah.

Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis 2014-2018:

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2014-2018**

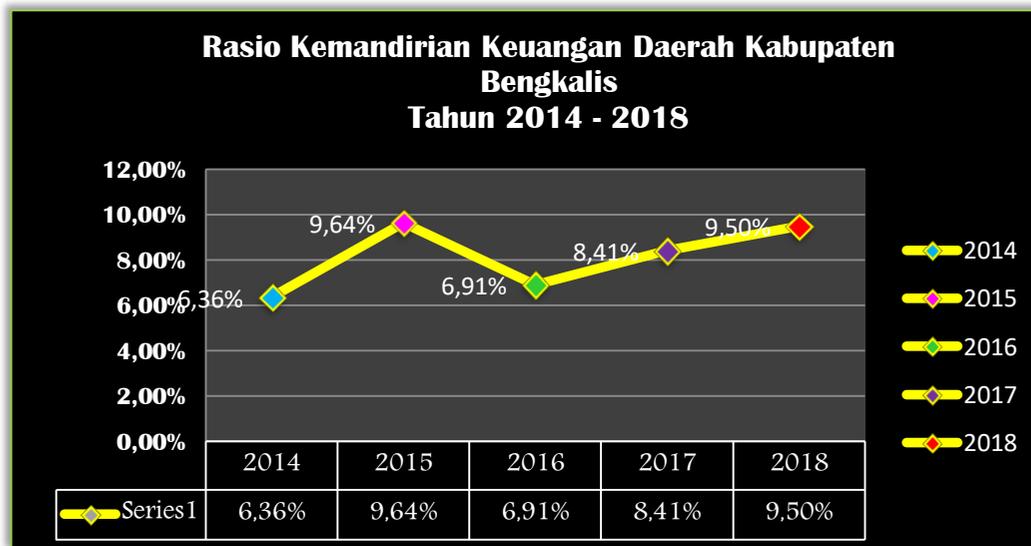
URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	88.473.234.804,19	51.035.362.940,42	47.854.327.923,41	71.781.060.155,74	65.992.135.999,25
Pendapatan Retribusi Daerah	75.207.904.171,52	59.794.690.236,03	31.188.867.751,95	14.565.502.467,79	14.689.253.182,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	32.254.667.667,00	37.902.960.213,00	21.238.125.981,00	31.492.480.950,00	31.369.321.102,00
Lain-lain PAD yang Sah	57.411.514.111,53	110.156.518.826,73	98.745.329.313,74	154.026.552.334,55	207.229.800.808,64
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	253.347.320.754,24	258.889.532.216,18	199.026.650.970,10	271.865.595.908,08	319.280.511.092,11
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMPUS - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	698.411.896.004,00	1.057.385.058.350,00	1.175.781.702.243,00	1.378.704.957.739,00	1.436.254.223.765,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	2.636.766.125.948,00	1.046.069.826.563,00	1.088.459.032.938,00	816.180.939.707,00	818.101.260.166,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	85.777.928.000,00	0,00	0,00	345.070.716.000,00	345.070.716.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.803.598.000,00	0,00	68.312.742.000,00	51.401.903.000,00	183.801.494.841,00
Jumlah Transfer Pempus - Dana Perimbangan	3.447.759.547.952,00	2.103.454.884.913,00	2.332.553.477.181,00	2.591.358.516.446,00	2.783.227.694.772,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	100.996.073.000,00	199.323.741.000,00	199.687.548.625,00	210.619.354.173,00	144.783.974.996,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	100.996.073.000,00	199.323.741.000,00	199.687.548.625,00	210.619.354.173,00	144.783.974.996,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	3.548.755.620.952,00	2.302.778.625.913,00	2.532.241.025.806,00	2.801.977.870.619,00	2.928.011.669.768,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	175.809.699.433,76	111.814.989.236,90	107.213.477.449,94	107.512.319.262,00	105.619.783.670,88
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	175.809.699.433,76	111.814.989.236,90	107.213.477.449,94	107.512.319.262,00	112.435.783.670,88
Jumlah Pendapatan Transfer	3.724.565.320.385,76	2.414.593.615.149,90	2.639.454.503.255,94	2.909.490.189.881,00	3.040.447.453.438,88
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	4.339.071.046,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	7.116.600.000,00	11.031.891.200,00	37.779.386.335,00	49.426.893.668,94	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	7.116.600.000,00	11.031.891.200,00	42.118.457.381,00	49.426.893.668,94	0,00
TOTAL PENDAPATAN	3.985.029.241.140,00	2.684.515.038.566,08	2.880.599.611.607,04	3.230.782.679.458,02	3.359.727.964.530,99
<i>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</i>	6,36%	9,64%	6,91%	8,41%	9,50%
<i>Pola Hubungan/Tingkat Kemandirian</i>	<i>Instruktif/Rendah Sekali</i>				

Sumber: Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa secara umum pola hubungan/tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 2014-2018 tergolong Instrukturif/Rendah Sekali. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan belum mampu menjalankan Otonomi Daerah secara baik.

Rasio Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Bengkalis bergerak secara fluktuatif. Fluktuasi Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018 dapat dilihat sebagai pada diagram berikut:

Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber: Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah bergerak dari angka 6,36% - 9,64%, terjadi kenaikan ditahun 2015 dan kembali turun ditahun 2016 serta kembali bergerak naik ditahun 2017 dan 2018. Namun kenaikan 2 tahun terakhir tersebut belum mampu melampaui performa terbaiknya sebesar 9,64% di tahun 2015.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum mampu untuk mandiri menjalankan otonomi daerah yang efektif. Setelah dua dekade implemtasi otonomi daerah ketergantungan Pemerintah Bengkalis terhadap pusat masih sangat tinggi. Ketergantungan akan dana bagi hasil migas yang tinggi ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat migas ini merupakan sumber yang tak terbarukan dan jumlahnya yang sangat terbatas sudah tentu tidak bisa dijadikan sumber APBD utama untuk jangka panjang.

Kemandirian yang sangat rendah ini menunjukkan Pemerintah Daerah belum mampu memaksimalkan PAD untuk membiayai belanja operasi/rutin dan belanja modal/pembangunan. Sudah tentu hal ini tidak memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat Bengkalis. Pemerintah Daerah belum mampu mensinergikan secara maksimal sumber-sumber PAD yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini juga menunjukkan belum optimalnya pembayaran pajak daerah, aset produktif daerah yang belum di kelola secara maksimal serta kurang jalannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga harus lebih meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi agar mampu memaksimalkan PAD.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014-2018

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah . Berikut adalah hasil perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis T. 2014-2018

No.	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
1	2014	Rp281.446.579.400,00	Rp253.347.320.754,24	90,02%	Efektif
2	2015	Rp337.287.017.893,16	Rp258.889.532.216,18	76,76%	Kurang Efektif
3	2016	Rp335.584.167.284,53	Rp199.026.650.970,10	59,31%	Tidak Efektif
4	2017	Rp373.540.392.000,00	Rp271.865.595.908,08	72,78%	Kurang Efektif
5	2018	Rp444.510.450.102,00	Rp319.280.511.092,11	71,83%	Kurang Efektif

Sumber: Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis 2014-2018 secara umum kurang efektif. Hanya tahun 2014 saja Rasio Efektivitas berada di kategori efektif. Bahkan di tahun 2016 merupakan tahun terburuk dalam periode 5 tahun terakhir realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana masuk dalam kategori tidak efektif. Karena kemampuan daerah dalam menjalankan keuangan pemerintahannya dikatakan efektif apabila rasio yang

dicapainya mencapai 100% atau lebih, semakin tinggi rasio efektivitas keuangan maka semakin baik pula kemampuan daerah tersebut mengelola keuangannya .

Tingginya rasio efektivitas keuangan artinya sama dengan tingginya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat dikatakan pula bahwa PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah telah mampu direalisasikan melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah sangat efektif dalam mengelola keuangannya terutama sumber pendapatannya yaitu PAD.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak, retribusi dan bagi hasil BUMD tidak sesuai dengan target. Realisasi PAD yang kurang baik ini menunjukkan Pemerintah Daerah belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak serta Badan Usaha Milik Daerah yang tidak berjalan secara optimal sehingga tidak mampu meningkatkan PAD. Hal ini juga tidak terlepas BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) milik Pemerintah Bengkalis tidak mampu mengelola unit usahanya sendiri, diantaranya APMS di Air Putih dikelola oleh pihak ketiga, sehingga laba yang diperoleh tidak maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Simpulan

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis tergolong instruktif/rendah sekali. Kemandirian yang sangat rendah ini menunjukkan Pemerintah Daerah belum mampu memaksimalkan PAD untuk membiayai belanja operasi/rutin dan belanja modal/pembangunan.

Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis tergolong kurang efektif. Karena rata-rata efektivitasnya dibawah 100%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak, retribusi dan bagi hasil BUMD tidak sesuai dengan target. Realisasi PAD yang kurang baik ini menunjukkan Pemerintah Daerah belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak serta Badan Usaha Milik Daerah yang tidak berjalan secara optimal sehingga tidak mampu meningkatkan PAD

Saran

Berdasarkan fakta temuan penelitian, maka beberapa saran yang dapat disampaikan bagi keperluan praktis maupun akademis

Pemerintah Kabupaten Bengkalis hendaknya memaksimalkan Unit Usaha BUMD yang ada di Kabupaten Bengkalis. Menggali lebih dalam lagi potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi usaha-usaha produktif yang bonafit. BUMD juga diharapkan memiliki tata kelola perusahaan yang baik, sehingga unit-unit usaha yang ada dapat dikelola secara mandiri tanpa melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat memperkaya variabel yang ada dengan indikator berbeda, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2014. *Audit Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, M Mahduh & Abdul Halim. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Syafri Sofyan, 2015. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. 2015, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hartono, 2019. *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Zanafa Publshing.
- Kuncoro, Mudrajat, 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia.
- Mahmudi, 2017. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2017. *Akuntansi sektor Publik Edisi 2*.Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Situmorang, Syafrizal Helmi & Dalimunthe, dkk. 2007. *Analisis Data Penelitian*, Medan: USU Press.
- Situmorang, Syafrizal Helmi. 2008. *Analisis Data Penelitian*, Medan: USU Press.

- Situmorang, Syafrizal Helmi & Paham Ginting. 2008. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*, Medan: USU Press.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul, 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, cetakan ke 2, Jakarta : Grafika Offset.
- Widjaja, 2003. *Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo .
- Yani, Ahmad, 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.